

NEGARA DAN KEMANUSIAAN: SEBUAH ESAI REFLEKSI

Shaummil Hadi

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim
Email: shaummil.hadi@gmail.com

Diterima 5 Oktober 2021/Disetujui 8 Oktober 2021

ABSTRAK

Tulisan ini adalah sebuah esai politik yang mendiskusikan negara dan masalah kemanusiaan dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Pendekatan yang digunakan dalam esai ini adalah pendekatan reflektif. Adapun, dalam ilmu hubungan internasional, negara adalah suatu konsep tentang entitas politik yang diakui keberadaannya untuk menjalankan fungsi dan tujuan kepentingannya. Sedangkan, kemanusiaan adalah suatu konsep moral dan filosofis yang menjadi salah satu pijakan masyarakat modern. Tulisan ini hendak menelusuri hubungan reflektif antara negara dan kemanusiaan dalam dua pandangan utama dalam ilmu hubungan internasional yakni realisme dan liberalisme. Berdasarkan pembahasan dari tulisan esai ini disimpulkan bahwa kemanusiaan berada pada ujung tanduk kekuasaan negara atau aliansi negara. Sejauh negara menjadi unit-sentris sistem internasional, sejauh itu juga kita tidak mampu keluar dari jebakan-jebakan regularitas internasional yang anarkhis. Maka, sudah semestinya kita memikirkan jalan keluar bagi pembebasan kemanusiaan di luar batas konsepsi negara-wetphalian. Hal ini dikarenakan dunia jauh lebih kompleks dari esai ini. Sama kompleksnya pandangan tentang negara dan kemanusiaan disisi lain. Namun, yang terus berlanjut dan ditatap dengan optimisme sejauh kita memiliki keyakinan bahwa demokrasi dan institusi liberal-internasional (seperti LBB dan PBB) seperti dinyatakan Woodrow Wilson adalah tahapan sejarah lainnya, bukan percobaan sebagai usaha mencapai perdamaian abadi (*The perpetual peace*).

Kata kunci: *kemanusiaan, liberalisme, negara, realisme*

PENDAHULUAN

Sejarah mengajarkan kita banyak hal, salah satunya tentang tragedi pahit kemanusiaan yang seharusnya tidak pernah terulang kembali. Adapun dalam disiplin ilmu hubungan internasional, negara menjadi pusat analisis atau unit utama analisis yang telah diakui keberadaannya dari masa lalu hingga saat ini. Sebagai unit analisis, hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan negara, perilaku negara dan interaksinya dengan negara lain dalam panggung dunia dilihat sebagai objek analisis untuk melihat pola perubahan dan kontinuitas politik dunia (Lake, 2008). Meskipun dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional saat ini berkembang beragam unit analisis, seperti INGO, organisasi regional dan transnasional, MNC, individu dan lainnya, namun tidak ada sanggahan yang berarti negara sebagai unit analisis ini. Bahkan, David Lake menyebutkan negara menjadi basis fundamental bagi analisis neorealisme (Waltz, 1979) dan Neoliberal institusionalisme (Keohane, 1984), konstruktivisme dan teori-teori Mazhab Inggris (Bull, 1977, Reus-Smit, 1999, Wend 1999). Lalu, David Lake menyebutkan teori-teori kritis, posmodernisme, dan feminisme dalam ilmu Hubungan Internasional masih berpangku pada fokus analisis problematika dan praktik negara (Lake, 2008).

Kemanusiaan adalah konsep yang menyatakan manusia dan kehidupannya menjadi pusat dari moralitas yang universal. Sebagai suatu doktrin, kemanusiaan mengekspresikan paradigma, sikap dan etik dengan fokus kajian masalah dan isu-isu yang berhubungan dengan kompleksitas kehidupan manusia. Adapun, dalam hal yang lebih spesifik, kemanusiaan mendorong manusia menilai dan memperbaiki diri atas dasar keberadaan dirinya sendiri. Semangat ini melahirkan individualisme yang menjadi pijakan dasar dari filsafat dan masyarakat modern. Tema kajian kontemporer seperti Hak Asasi Manusia, keamanan manusia (*human-security*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah tema yang berpusat dari kemanusiaan sebagai konsep moral dan analisis.

Tulisan ini adalah sebuah esai politik yang mendiskusikan negara dan masalah kemanusiaan dalam perspektif ilmu hubungan internasional. Tulisan esai ini ingin menelusuri hubungan reflektif antara negara dan kemanusiaan dengan memanfaatkan dua pandangan utama dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme dan liberalisme. Tujuan dari esai ini adalah ingin meletakkan kembali pemahaman antara negara dan kemanusiaan dalam sudut pandang yang lebih reflektif.

PEMBAHASAN

Mungkin, tidak ada yang salah pada Realisme?

Jauh sebelum entitas politik dikenal dan didiskusikan, hubungan antarindividu dan kelompok di muka bumi ditandai dengan sifat agresifitas, konflik kepentingan, pengejaran pada simbol kekuasaan dan harapan pada keinginan hidup selamanya. Suku-suku terdahulu tidak hanya berupaya untuk dapat hidup dengan cara menemukan sumber daya makanan untuk hidupnya atau kelompoknya, tetapi terdapat hasrat untuk dapat menemukan suatu kehidupan yang abadi (*immortal life*). Hakikatnya, apa yang dipahami sebagai suatu kemanusiaan adalah bagaimana manusia baik sebagai individu maupun kelompok mampu bertahan hidup dan menemukan kehidupan abadi yang ada di ujung sana.

Mengambil bentuk pemahaman ini, realisme kemudian mentrasendensikan sifat asal individu (*human nature*) di atas ke dalam negara, lalu diarahkan pada arena internasional tempat habitus negara itu berada. Sama halnya dengan individu, sebagaimana dibayangkan Hobbes dalam *Leviathan*, negara-negara dalam arena internasional bersifat anarkhis, mengejar kepentingan diri sendiri untuk bertahan hidup, bahkan dalam tujuan ultimanya negara ingin mengejar bentuk *immortal life* dengan sisi yang berbeda, yaitu kekuasaan atas kekuasaan (*power reign power*) untuk mempengaruhi lainnya demi kelangsungan negara itu sendiri. ***Negara harus tetap berlangsung; ideologi, pemimpin dan individu-individu dapat saja mati dan digantikan dengan yang lain!!!***

Pada titik inilah, realisme menghadapi persoalannya, alih-alih awal hendak bertrasendensikan individu mencapai basis dasar kepentingannya melalui organ mekanis negara. Namun, kenyataannya negara realisme justru menghadapi kebuntuan dan frustrasi dalam melayani pengejaran kepentingannya di arena internasional. Kepentingan suatu negara dengan negara lain saling *overlap*, sama-sama ingin *immortal-life*. Sehingga, siapa peduli soal moral atau justifikasi normatif? Bukankah raja (negara) mengejar kepentingannya untuk kebajikan (*virtue*) warganya, seperti dianjurkan Machiavelli?

Lalu, negara-negara bertengkar dan saling menghancurkan satu sama lain, baik perang fisik, perang urat syaraf diplomasi, perang tekanan isolasi politik dan sanksi ekonomi; bahkan jauh dari garis batas kedaulatannya sendiri. Negara-negara ini berjuang untuk tujuan *immortal life* satu sama lainnya, dengan tidak melihat latar belakang ideologinya, baik negara demokrasi dan otoritarian, demokrasi dan otokrasi, negara demokrasi-kapitalis dan sosialis-komunis, barat dan timur, islam dan aliansi yahudi-kristiani, bahkan sesama negara sesama demokrasi memiliki keinginan yang sama. ***“Semua ideologi penuh perdamaian, tetapi sejarah penuh kemarahan,”*** disebutkan secara tepat oleh sersan serdadu tank Amerika Serikat, Don “Wardaddy” Collier, dalam film fiksi yang berjudul *Fury* (2014).

Tahun 1933, Hitler yang baru mencapai kekuasaannya, menuju ke Timur demi mempersatukan “Jerman” dan masuk ke Barat wilayah Eropa. Sehingga, dilandasi amarah-sejarah yang terpendam lama, Hitler dengan NAZI dan serdadu SS-nya yang kejam dan terlatih bergerak tergesa-gesa; memecah kesunyian negara Barat Wesphalian. Perang Dunia Kedua pun dimulai, masing-masing pihak yang ikut dalam perang menjajal teknologi modern yang dimilikinya dalam pertarungan. Aliansi antarnegara diciptakan menurut “ideologi menuju perdamaian” yang dianut masing-masing. Sayangnya, usaha Hitler dengan Nazinya memperluas *Lebensraum* gagal bukan saja karena ketidakmampuannya mengelola perang, tetapi kekejamannya pada minoritas Yahudi (Holocaust),

yang membangkitkan gairah Amerika Serikat untuk keluar dari politik isolasionisme dan masuk pertempuran untuk menyelamatkan Eropa dan dunia itu sendiri.

Perang berkecamuk di Asia Pasifik hingga bom atom dengan kekuatan maha dahsyat, dijatuhkan di Hiroshima Jepang 1945, penanda berakhirnya perang dunia kedua. Adapun, dalam perang ini tidak terhitung jumlah korban dan ketika perang dunia kedua dinyatakan berakhir pada 1945, seakan secercah harapan baru ditemukan tidak saja bagi Eropa melalui sumbangsih Marshal Plan, tetapi bagi kemanusiaan dan dunia yang lebih aman dan adil, dimana negara-negara baru terliberasi menjadi negara poskolonial. Namun, era itu bukan menandai suatu kedamaian seperti yang diharapkan atau bukan berarti perang tidak ada, perang tetap saja ada tetapi menjadi perang yang lebih dingin, *The Cold-War*. Pada era baru ini, negara-negara saling mencari pengaruh yang lebih besar diantara dua blok, sosialis-komunis dan demokrasi-kapitalisme. Blok-blok ini dimotori pemenang perang dunia, USSR-sekutu disatu pihak dan AS beserta sekutu dipihak lain. Tujuan utama dalam blok-blok ini dasarnya sama yaitu bagaimana mencapai hidup yang lebih panjang atau paling tidak mampu bertahan hidup. Meskipun perang dingin memperkenalkan model perdamaian dalam sistem internasional, yaitu keseimbangan kekuasaan (*the balance of power*), tetap saja problema dilema keamanan (*security dilemma*) terus menghantui negara walaupun konsepsi wethphalian dikenal beratus tahun lamanya.

“*Si vis pacem, para bellum!!!*” Kemudian, negara-negara mempersiapkan dirinya dengan perang nuklir, perang yang lebih mematikan dari perang sebelumnya yang ada di muka bumi. Pada era ini, teknologi persenjataan militer meningkat pesat seiring meningkatnya investasi pemerintah dan kalangan usaha. Akhirnya, pada sejarah yang membentang jauh ke belakang, terlihat bahwa kemanusiaan dengan mudah tergadaikan karena beragam sebab. Bahkan, konsepsi negara memikul beban kesalahan yang besar atas masalah kemanusiaan itu sendiri. Meskipun sebenarnya tidak dapat dikatakan demikian, tetapi tidak pernah berniat beranjak darinya.

Postulat Liberal dan Cita-Cita Kemanusiaan

Usaha membebaskan individu dari kekangan telah terjadi beratus tahun lamanya. Para nabi dan rasul “mereka yang paling dekat dengan Tuhan” diciptakan untuk turun ke bumi untuk membebaskan manusia dari sifat asalnya. Mereka diperintahkan Tuhan untuk memberi jalan yang lurus kepada seluruh umat manusia menuju perdamaian, membebaskan budak dan wanita menuju kesetaraan posisi antarmanusia. Lalu, agama dilembagakan untuk mempermudah menggerakkan mesin pembebasan itu. Namun, dalam perjalanannya agama disalahgunakan untuk kekuasaan individu yang mengatas namakan agama dan menjadi alat kekuasaan dari individu yang serakah pada nafsu keduniawiaan.

Ketika era lembaga agama berada pada puncaknya, kekuasaan justru berjaln kelindan didalamnya dan agama terjebak dalam mesin kekuasaan. Bahkan, diketahui bahwa pada waktu itu, kontrol masyarakat (individu-individu) dikuasai pemerintahan monarki-absolut (misal Perancis dan Spanyol) maupun dibawah kontrol langsung gereja. Lalu, terjadilah penolakan massal untuk memisahkan *theisme* yang berjaln kekuasaan didalamnya dengan *humanisme*, disebut pemecahan (*aufklarung*). Pada puncaknya pencerahaan melahirkan revolusi Perancis (1789-1799). Era dimana hak-hak individu diusung dan dimanifestasikan dalam beragam tempat kebudayaan dan politik. Revolusi ini mengikrarkan istilah “*Liberty, Egaliter dan Fraternity*”. Revolusi ini melahirkan gagasan liberalisme. Suatu ikrar yang menyiratkan fondasi pemahaman yang diletakkan kepada perihal “*manusia dan kemanusiaan*” (human dan humanity). Sejak itu ide tentang *human* dan *humanisme* dibahas dan berkembang hingga saat ini.

Aspek-aspek kemanusiaan diperdengarkan dan aturan-aturan yang lebih manusiawi pun lahir. Tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa suatu organisasi supra-state mendeklarasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Suatu prinsip yang hendak mengedepankan penghargaan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia tanpa suatu pengecualian (*non-derogable right*). Liberalisme percaya pada *human-*

progress, suatu kemampuan manusia untuk terus memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan, dalam jiwa manusia ada daya kerjasama satu sama lain dan saling membantu untuk menciptakan perubahan dan pembebasan. Namun, liberalisme yang mengidamkan pembebasan manusia berbanding terbalik dari kenyataannya. Liberalisme, menghasilkan kompetisi antarindividu yang lebih tajam dan menghasilkan jurang ketidakseimbangan pada individu yang tidak memiliki kapabilitas bertahan.

Bahkan, tidak jarang terlupakan bahwa liberalisme yang dipahami pada dasarnya berada dalam pengaruh konsepsi negara-westphalian. Cita-cita pembebasan masih berada dalam jebakan konsepsi negara. Postulat realis mungkin tidak terbantahkan? Bahkan ide Wilsonian dengan “liberal-internasionalisme” yang ingin membawa sistem demokrasi dalam pemerintahan tidak cukup mampu membendung semangat negara untuk mempertahankan dirinya atau untuk mencapai *immortal life*.

Negara dan Kemanusiaan

Dunia kenyataan dalam sistem internasional adalah pengaturan-pengaturan tindakan yang rasional, bukan motivasi yang dinyatakan Immanuel Kant. Suatu tindakan irrasional dapat membawa kematian, *life is better than others*. Maka, didorong oleh ide liberal humanitarian, di tahun 1991 Amerika Serikat masuk dalam konflik internal di Somalia hendak menerapkan ‘*the right to intervene*’. Alih-alih ingin membantu korban perang, justru terjebak di tengah-tengah antara pihak yang bertikai dan peristiwa ***The Black Hawk Down*** terjadi. Amerika menarik diri setelah peristiwa tersebut. Tahun 1994 di Rwanda, Hutu-Tutsi saling bertikai, namun Amerika Serikat diam, sama halnya dunia internasional melihat peristiwa itu terjadi. Adapun, dalam negeri Amerika publik terpecah, yang mendorong keterlibatan Amerika dan yang mencegah terulangnya peristiwa Black Hawk Down lainnya (yang sesekali melihat dampak dari perang Vietnam bagi rakyat AS).

Sejak itu, intervensi yang jauh dari garis batas kemanusiaan tak lebih dimotivasi oleh semangat untuk kekuasaan, mempertahankan diri, mencari sumber daya untuk menjaga keberlangsungan negara, bukan cita-cita kemanusiaan. Sebagaimana yang terjadi di Bosnia, Kosovo, Timor Leste dan lainnya. Hal ini terjadi pada aliansi seperti NATO. Kalkulasi atas kepentingan nasional dan kekuasaan jauh lebih penting, kemanusiaan dapat digadaikan. Prajurit yang mati dalam perang adalah pahlawan bagi negaranya dan yang hidup dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Korban rakyat jelata yang tidak terkait dengan perang tidak lebih dari deretan statistik, diperbincangkan lalu hilang, di bawah klaim kelangsungan negara adalah tujuan akhir dari pada kemanusiaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari tulisan esai ini disimpulkan bahwa kemanusiaan berada pada ujung tanduk kekuasaan negara atau aliansi negara. Sejauh negara menjadi unit-sentris sistem internasional, sejauh itu juga kita tidak mampu keluar dari jebakan-jebakan regularitas internasional yang anarkhis. Maka, sudah semestinya kita memikirkan jalan keluar bagi pembebasan kemanusiaan di luar batas konsepsi negara-wetphalian. Hal ini dikarenakan dunia jauh lebih kompleks dari esai ini. Sama kompleksnya pandangan tentang negara dan kemanusiaan disisi lain. Namun, yang terus berlanjut dan ditatap dengan optimisme sejauh kita memiliki keyakinan bahwa demokrasi dan institusi liberal-internasional (seperti LBB dan PBB) seperti dinyatakan Woodrow Wilson adalah tahapan sejarah lainnya, bukan percobaan sebagai usaha mencapai perdamaian abadi (*The perpetual peace*).

REFERENSI

- Anthony, Lang (Ed). 2003. *Just Intervention*. Washington: Georgetown University Press.
David, P. Barash (Ed). 2000. *Approaches to Peace: A Reader in Peace Studies*. New York: Oxford University Press.

David, A. Lake. 2008. *The State and International Relations*, dalam Christian Reus-Smit dan Duncan Snidal (Eds), *The Oxford Handbook of International Relations*. Oxford: Oxford University Press.

Jack, Donnely. 2007. *International Human Rights*. Cambridge: Westview Press.

Michael, Barnett. 2011. *Empire of Humanity: A History of Humanitaris*. Ithaca: Cornell University Press.

William, E. Scheuerman. 2011. *The Realist Case For Global Reform*. Cambridge: Polity Press.